

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.

Ali Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013.

Apeldoorn Van dalam O. Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Dua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Arief Basrief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.

Atmadja I Dewa Gede, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.

Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Purnomo, dan Aruan Sakidjo *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988.

Barda Nawawi Arief, *Muladi Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- Chazawi, Adam *pelajaran hukum pidana bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Christine Cst Kansil, S.T Kansil, Engelien R⁷³, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Effendy, Marwan *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010).
- Hamzah Andi, (I) *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Bosar Z Siregar, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- HMA Kuffa, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Huku*, UMM Press, Malang, 2007.
- Hong Lu, *Punismnet dan Terrance D.Mithe: A commparative Historical Perspective*, Cambrige University Press, Cambridge, 2005.
- J.E. Sahetapy, *Terjemahan dari Schaffimeter et a1, Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

- JE Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Kebijakan Peradilan, Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar September 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Hadjon Philipus, "*tentang Wewenang*", *Yuridika*, No.5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997.
- M. Hadjon Philipus, 1987, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya. Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon 1.
- M. Hadjon Philipus, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon 1.
- M. Manulang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- M. Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2009.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moh. Mahfud MD, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- PAF. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Padmo, Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Padmo, Wahyono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, ind-hill co., Jakarta, 1989.
- Pramadya Puspa Yan, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Akademika Presido, Jakarta, 1993.
- Prodjodikoro, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politea, 1980.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Raharjo, Satjipto, TT, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta.
- Rapar J.H., *Filsafat Politik Aristoteles*, Edisi 1, Cetakan 1, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono “Masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset, Legal Opinion (sebagai nara sumber dalam sosialisasi RUU Perampasan Aset)”, Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember 2009.
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika-cet. 3. Jakarta, 2002.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.

Salah K.Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Sasongko Hari, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Soepiadhy Soetanto, *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, Surabaya, 28 Maret 2012.

Soerjono, Soekanto, 1976, *Berbagai Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

Soerjono, Soekanto, *Berbagai Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1976

Stelinga Dalam E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Theo Lamintang dan PAF.Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

W. Friedman, *Legal Theory*, Fourth Edition, Steven and Son Limited, London, 1960, Dalam Munir Fuadi, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150), Penjelasan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : PER-03 Tahun 2018

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014 atas nama Deddy Kusdinar dkk (berkekuatan hukum tetap)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017

Internet/ Website :

www.kpk.go.id

www.kejaksaan.go.id

[Http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindakpidanakorupsi.html](http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindakpidanakorupsi.html), diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2013 pukul 18.00 WIB.

Makalah/ Naskah Jurnal :

Hadjon Philipus M., *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Effendy Marwan, *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012.

Lampiran-Lampiran dan Surat Edaran :

Lampiran Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2000.

Laporan Tahunan KPK (*Annual Report*) Tahun 2012 dan 2013.